KEBIJAKAN TATA GUNA LAHAN

PENDAHULUAN

- Kira-kira 1/6 dari tanah daratan berwujud padang pasir,
- ¼ tanah daratan di dunia ini berupa daratan yang gersang namun dapat ditanami.
- Selanjutnya hanya sekitar 11 % dari tanah daratan yang ditanami.
- Sekitar 1/3 dari tanah daratan ditempati oleh kota-kota, jalan dan bangunan lain.

Lahan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian

Unsur-unsur dalam pambangunan pertanian

Y = f (L,K,R,T,S)

Keterangan :

Y = produksi pertanian

L = labor (tenaga kerja)

K = kapital

R = resources (termasuk tanah)

T = teknologi

S = sosial budaya masyarakat

Problem menyangkut lahan pertanian

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian menyangkut aspek lahan, yaitu :

- ➔ adanya kecenderungan berkurangnya luas
- ➔ adanya kecenderungan penurunan kualitas
- ➔ adanya kecenderungan perpecahan *(division)* dan perpencaran *(fragmentasi)* lahan

- Berkurangnya luas lahan pertanian, diantaranya karena konversi lahan pertanian ke non pertanian (alih fungsi lahan pertanian) atau sebab yang lain (bencana alam, dll)
- Penurunan kualitas lahan (degradasi lahan), karena dalam berusahatani kurang memperhatikan masalah konservasi.
- Adanya perpecahan dan perpencaran diantaranya karena masalah pewarisan.

- Permasalahan tersebut telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- Oleh sebab itu perlu ada kebijakan yang mengatur hal tersebut.

KONVERSI LAHAN PERTANIAN

- Perkembangan kebutuhan lahan untuk sektor industri, perumahan dan prasarana wilayah mendorong terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

- Konversi lahan pertanian di Indonesia :

BPS (1983-1993) :	-935.000 Ha
Tabor (1998) :	- 425.000 Ha sawah
	- 510.000 Ha non sawah
Hafsjah (2003) :	- 47.000 Ha/Tahun
Deptan (2005) :	- 84.500 Ha/Tahun

Konversi lahan pertanian ke non pertanian di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang biasa saja karena merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan kota (sesuai dengan teori *rent)* .

Di sisi yang lain dipandang sebagai suatu masalah karena selain berpengaruh pada produksi pangan juga dapat berpengaruh pada kualitas lingkungan.

Hubungan *land rent* dengan *land use*

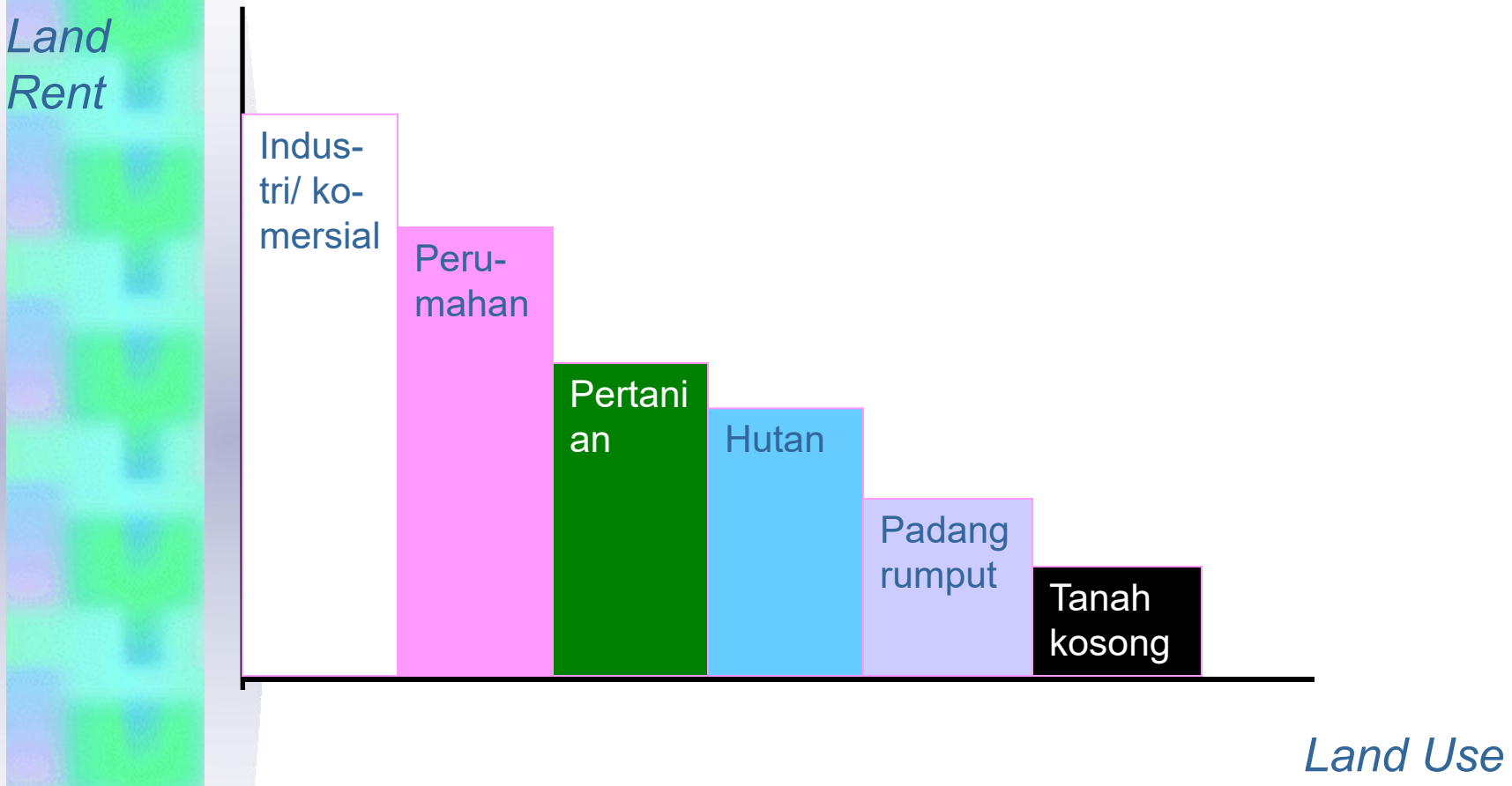

Sumber : Barlowe, 1986, hal.14

Degradasi, perpecahan dan perpencaran lahan

Degradasi lahan diantaranya terjadi karena :

- penggunaan lahan tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan,
- cara-cara budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, dan
- eksploitasi yang berlebihan terhadap lahan yang ada.

Oleh sebab itu dalam berbudidaya pertanian perlu memperhatikan masalah konservasi lahan agar kualitas lahan tetap lestari.

- Perpecahan lahan adalah pembagian milik seseorang ke dalam bidang atau petak kecil-kecil, untuk dimiliki orang lain.
- Perpencaran lahan adalah kenyataan adanya usahatani (dibawah satu manajemen) yang terdiri atas beberapa bidang yang berserak-serak.

Arah kebijakan pertanahan menunjang pemb. Pert. :

1. upaya rehabilitasi tnh kritis utk memulihkan & mempertahankan kesuburan tnh, sumber air, kelestarian SDA & lingkungan hidup.
2. penggunaan, penguasaan, pemilikan hak atas tnh & pengalihannya menjamin kemudahan & kelancaran usaha pertanian.
3. penetapan larangan pemilikan tnh perorgan berlebihan & mencegah pembagian tanah mjd sangat kecil sbg sumber kehidupan.
4. menunjang sub sektor tnm pangan dlm rangka swasembada pangan.
5. penggunaan tnh utk perkebunan, dg pengemb. tnh kering & areal transmigrasi, melalui pengemb. perkebunan rky, pemanfaatan tnh-tnh perkebunan terlantar/diusahakan tdk efisien, & pengemb. perkebunan besar & swasta besar.

Riset 1 : Sebaran AFLP di Propinsi Jawa Tengah

- Luas sawah total tahun 2000 dan 2010 telah berkurang 6.484 ha.
- Selama satu dekade (tahun 2000 sampai 2010) telah terjadi AFLP (sawah) sebesar 14.830 ha (setara 1.483/tahun atau 4,12 hektar/hari).
- Konversi lahan terluas di Kab Magelang (253,9 ha/tahun) diikuti Kab Pekalongan, Kendal, Banjarnegara dan Wonosobo (antara 123 ha/tahun sampai 152,1 ha/tahun).

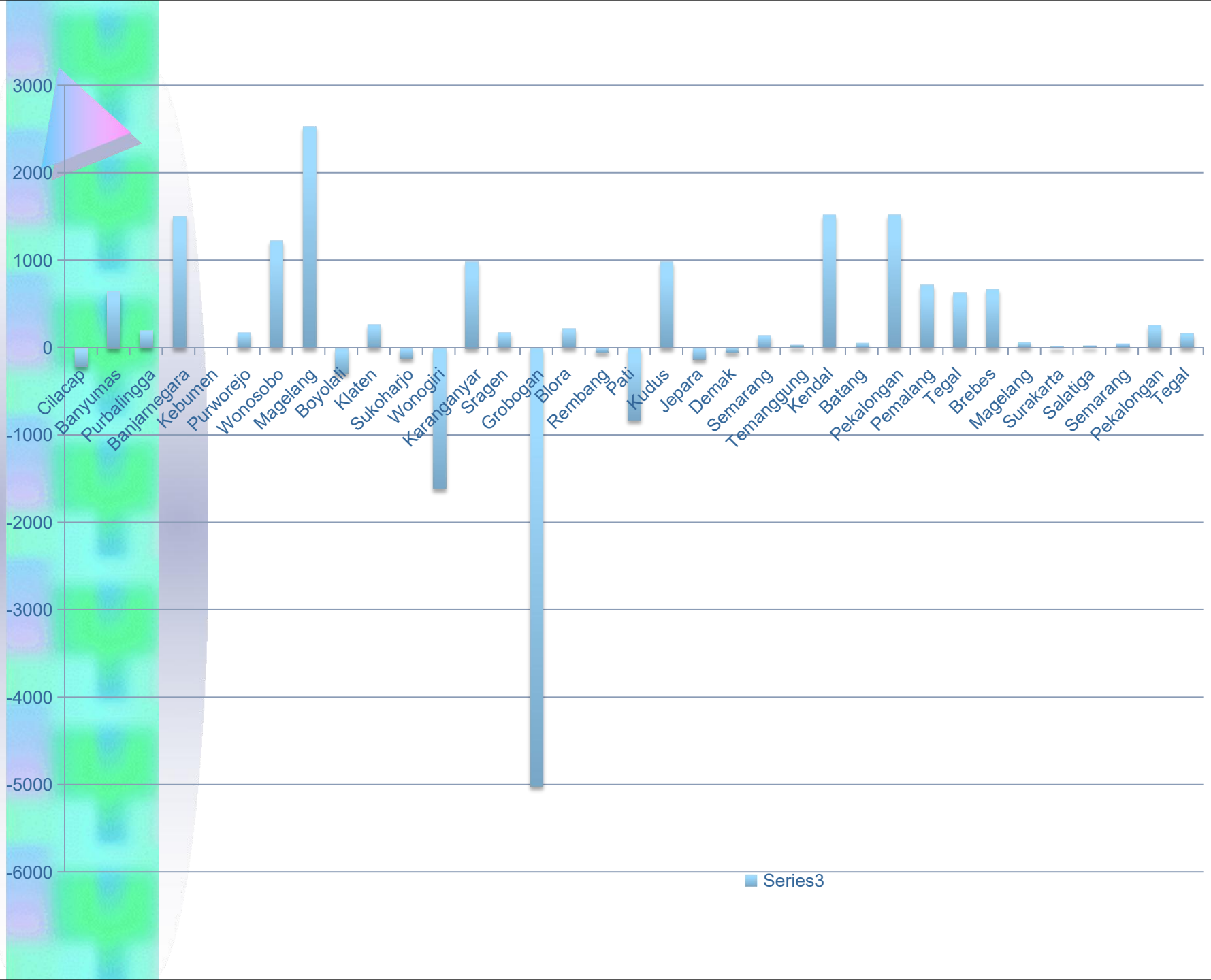
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Kudus
Jepara
Demak
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Magelang
Surakarta
Salatiga
Semarang
Pekalongan
Tegal
Series3

Produktivitas Padi di Jawa Tengah

- Produktivitas padi di kab dan kota di Prop Jawa Tengah berkisar antara 3,52 – 6,43 ton/ha
- Rata-rata produktivitas padi meningkat dari 5,41 ton/hektar pada tahun 2000 menjadi 5,71 ton/tahun pada tahun 2010.

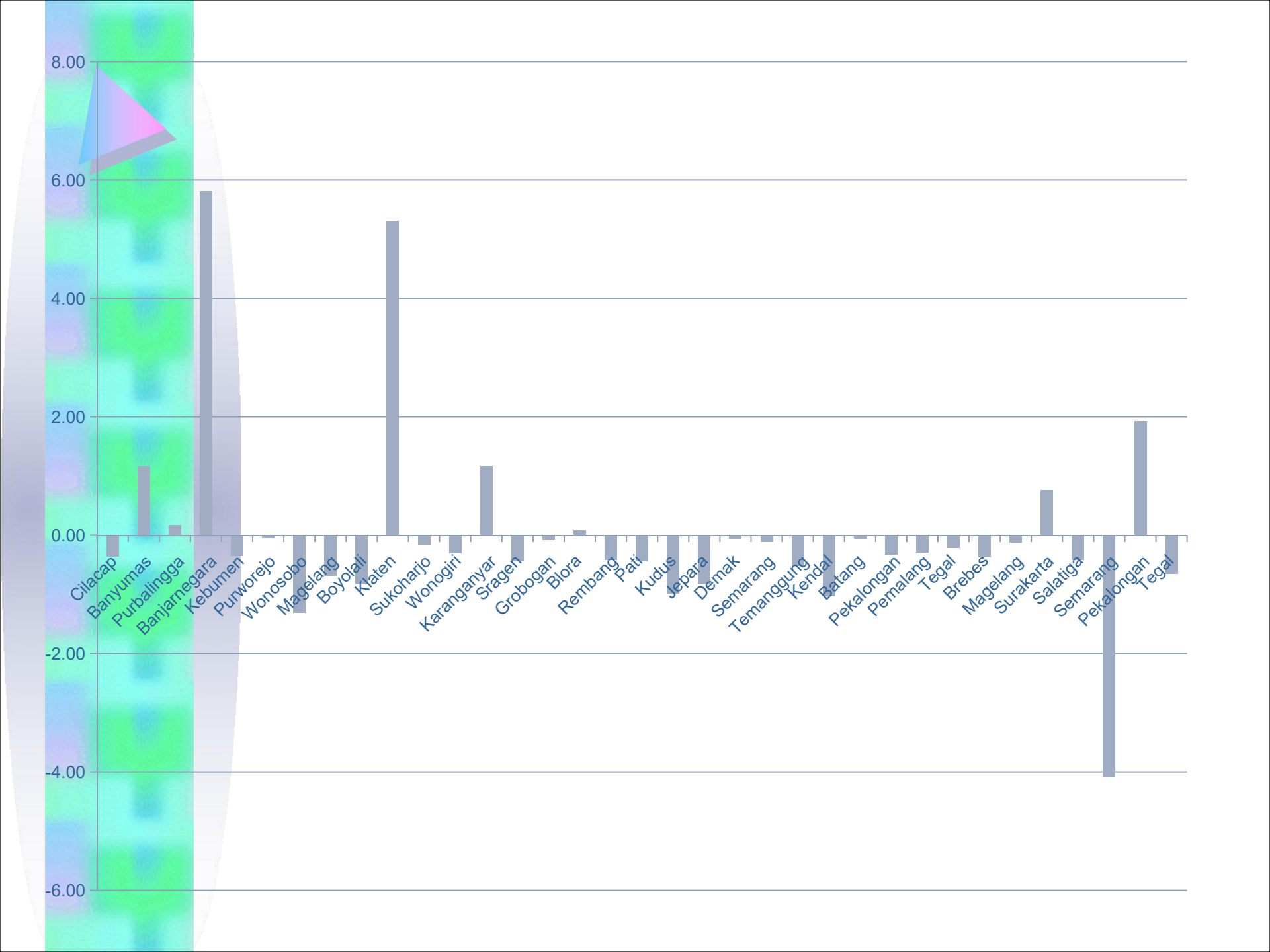
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Kudus
Jepara
Demak
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Magelang
Surakarta
Salatiga
Semarang
Pekalongan
Tegal

DAMPAK AFLP TERHADAP PRODUKSI PADI

Konversi lahan tersebut berakibat pada pengurangan produksi padi berkurang sebesar 254.000 ton per tahun

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Alih fungsi lahan pertanian harus dikendalikan agar kehilangan potensi produksi padi tidak semakin membesar.
2. Salah satu cara untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian adalah dengan menerapkan insentif (bagi yang tidak melakukan) dan disinsentif (bagi yang melakukan AFLP)

Riset 2 : Konversi Lahan Oleh RT Petani Thn 1998 sd 2010

Rata2 Pemilikan lahan	Jaten	Jumantono	Karanganyar
Tahun 1998	0,70	0,32	0,42
Tahun 2010	0,46	0,23	0,30
Konversi	-0.283	-0.053	-0.12

APA ARTI PENTING LAHAN PERTANIAN ??

Konversi lahan : perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain.

Luas Lahan Sawah dan Perubahannya di kawasan Subosuka Wonosraten Tahun 2004-2008

KAB	Luas (hektar)					Perubahan (hektar)			
	2004	2005	2006	2007	2008	04-05	05-06	06-07	07-08
SU	177	104	104	106	106	-73	0	2	0
BO	22,967	22,920	23,412	23,077	23,070	-47	492	-335	-7
SU	21,178	21,108	21,096	21,111	21,102	-70	-12	15	-9
KA	22,859	22,750	22,704	22,241	22,341	-109	-46	-463	100
WON	31,417	32,814	32,702	32,148	32,105	1,397	-112	-554	-43
SRA	39,759	39,959	40,339	40,339	40,339	200	380	0	0
TEN	33,541	33,494	33,464	33,435	33,172	-47	-30	-29	-263

Laju pertumbuhan sawah, PDRB dan TK SP di kawasan Subosuka Wonosraten Tahun 2004 - 2008

KAB	2004-2005			2005-2006			2006-2007			2007-2008		
	Swh	Pdrb	TK	Swh	Pdrb	TK	Swh	Pdrb	TK	Swh	Pdrb	TK
SU	-0.702	*0.01*	0.51	0.000	*0.01*	-0.38	0.019	*0.02*	-0.11	0.000	*-0.01*	0.12
BO	-0.002	*0.05*	-0.05	0.021	*0.02*	0.12	-0.015	*0.01*	-0.05	0.000	*0.02*	-0.10
SU	-0.003	*0.06*	-0.20	-0.001	*0.04*	-0.04	0.001	*0.04*	0.31	0.000	*0.06*	-0.10
KA	-0.005	*0.06*	-0.15	-0.002	*0.04*	-0.16	-0.021	*0.06*	-0.02	0.004	*0.09*	0.01
WO	0.043	*0.04*	-0.13	-0.003	*0.04*	0.06	-0.017	*0.04*	0.08	-0.001	*0.04*	-0.03
SRA	0.005	*0.04*	-0.16	0.009	*0.03*	-0.09	0.000	*0.04*	0.12	0.000	*0.03*	-0.16
TEN	-0.001	*0.02*	0.25	-0.001	*0.02*	-0.35	-0.001	*0.02*	0.21	-0.008	*0.01*	0.08
Rata	-0.095	0.04	0.01	0.003	0.03	-0.12	-0.005	0.03	0.08	-0.001	0.03	-0.03

Perubahan penggunaan lahan di Kab KRA Tahun 2003 – 2008

Jenis Penggunaan	2003-2008	Rata2/tahun
Perkampungan	108,948	18,16
Industri	0,000	0,00
Pertambangan	0,000	0,00
Persawahan	-56,084	-9,35
Pert Tanah Kering	-20,151	-3,36
Kebun	0,000	0,00
Perkebunan	0,000	0,00
Padang rumput	0,000	0,00
Hutan	0,000	0,00
Perairan Darat	0,000	0,00
Tanah terbuka	0,000	0,00
Lain-lain	-6,775	-1,13

FAKTA menunjukkan bahwa

Konversi (alih fungsi) lahan pert ke non pert mjd ancaman serius bagi ketahanan pangan.

Data BPS selama 1999 – 2002 :

lahan sawah ↓ 563.159 ha atau 167.150 ha/thn

Tahun 2002, lahan sawah 8,9 juta ha

Konsumsi beras

thn 2001 : 153,56 kg / kapita/thn,

thn 2006 : 154,14 kg/ kapita/thn.

Diprediksi thn 2021 : 157 kg / kapita / thn →

butuh lahan 9,3 juta ha

Mengapa lahan sawah lebih rentan untuk dikonversi ???

1. Tekanan pdu atas lahan >>>>
2. Lokasi berdekatan dg perkotaan
3. Infrastruktur lbh baik drpd lhn kering
4. Pemb sarana & prasarana lbh cepat

Apa yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ??

1. Perkembngan kehidupan → juml pdu >, tuntutan hdp ↑
2. Alasan ek : land rent non pert >>>> land rent pert
3. NTP trs merosot, input & resiko ushtn >> & *unpredictable*
4. Saat booming ek, insentif Pem utk mengejar pertumb ek
5. Kesalahan kebjkan industri yg terlepas dr pert,

   pe↓ 1 % sumbgn SP ke PDB hanya me↓ 0,4 % TK SP,

   bandingkan dgn Korea Selatan 1,56 %

   Malaysia 1,02 %

   Thailand 1,1 %

Jika rata2 pertumb ek 5 % terus, mk baru pd thn

2035 pdpt/kap mencapai $ 3.540 (Malaysia , 2002)

2056 pdpt/kap mencapai $ 9.930 (Korsel, 2002)

Mengapa alih fungsi lahan sawah harus dikendalikan ???

1. Mengancam ketahanan pangan nasional

➔ Aspek kuantitas ketersediaan pangan

➔ Aspek Stabilitas Ketersediaan Pangan Menurut Waktu

➔ Aspek Aksesibilitas Pangan Rumah Tangga

Me↓ vol air hujan yg diserap tnh 15 -19 %

Me↑ vol aliran permkn dr 30 % mjd 40 – 60 %

Me↑ kecptn aliran permkn dr 0,7 mjd 1,2 m/detik

2. Biaya investasi lahan irigasi teknis mencapai US $ 4.000 – 6.0000 / hektar & pembentukan ekosistem swh butuh wkt 5 – 6 tahun.

PERANGKAT HUKUM
YG MENGATUR PEMBATASAN AFLP

UU No 5/1960	Peraturan Dasar Pokok2 Agraria (UUPA). Lihat psl. 7, 10 & 18
UU No 24/1992	Penataan Ruang . Lihat psl. 14
PP No 77/2004	Irigasi. Lihat ps. 44
PP No 16/2004	Penatagunaan Lahan . Lihat ps. 3 dan 13
PerPres RI No 36/2005	Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan utk kepentingan umum. Lihat ps. 2

PERANGKAT HUKUM
YG MENGATUR PEMBATASAN AFLP

Srt Edaran MNA kpd BPN No 040-3346 tgl 31 Okt 1994	Perubahan Penggunaan tanah sawah irigasi teknis utk penggunaan non pert
Srt Edaran MNA kpd BPN No 460-1594 tgl 6 Juli 1996	Pencegahan konversi tanah sawah irigasi teknis menjadi tanah kering.
Srt Edaran MNA kpd BAPPENAS No 410-2261 tgl 22 Juli 2004	Pencegahan Penggunaan tanah sawah irigasi teknis utk penggunaan non pert

Perlindungan hkm utk AFLP krg memadai, sebab :

1. PerUU tdk kondusif bg pemecahan mslh pertnhan
2. Kelembagaan pertnhan blm efektif & efisien
3. Pelaksanaan pendaftaran tanah blm optimal
4. Tdk terkendalinya perub penggunaan & pemanfaatan tnh
5. Lemahnya sistem informasi berbasis tanah
6. Mekanisme pemecahan konflik pertnhan blm memadai
7. Lemahnya sistem perpajakan tanah dlm mendistribusikan aset tanah
8. Blm memadainya perlindgn hak masy atas tnh
9. Terbatasnya akses masy thd pemilikan & penguasaan tanah secara adil.

Strategi Implementasi Kebijakan Terkait Konversi Lahan Pertanian

1
- Memperkecil peluang terjadinya konversi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya konversi lahan.

2
- Mengendalikan kegiatan konversi lahan dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan

3
- Menanggulangi atau menetralisir dampak negatif konversi lahan.